
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Lpm) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Beo Barat Tahun 2018-2019

Oleh :

Marsel Kristian Tuwongkesong¹

Johannis E. Kaawoan²

Ismail Rachman³

Abstrak

Terdapat masalah pada lembaga pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahan beo barat sehingga perlu adanya kontribusi dari semua masyarakat. Atasnya yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peranan LPM dalam proses perencanaan pembangunan Di Kelurahan Beo Barat kecamatan Beo kabupaten kepulauan Talaud? kepulauan Talaud. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM untuk masyarakat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Beo Barat dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik, bangunan yang telah dibuat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Peran, LPM, Perencanaan Pembangunan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

PENDAHULUAN

Pemerintahan sebagai salah satu unsur negara, memiliki peranan dan fungsi yang amat penting yaitu memajukan kesejahteraan masyarakat, fungsi pemerintahan tersebut mengalami proses perkembangan sebagai akibat perkembangan negara sejalan dengan dinamika warga negaranya. Apabila dibuka kembali kebijakan otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah pada saat sekarang ini, maka nampak jelas bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintah, kecuali kewenang pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan di tetapkan dengan peraturan pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

Peningkatan pembangunan dan efisiensi nasional membutuhkan kepastian hukum. Tegaknya hukum berkeadilan merupakan jasa pemerintah yang terasa teramat sulit diwujudkan, namun mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintahan, sebab bersifat vital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecamatan dalam penyusunan berbagai kebijakan publik tersebut pada akhirnya harus dituangkan dalam sistem perundang

undangan untuk memiliki kekuatan hukum, dan harus mengandung kepastian hukum.

Sesuai dengan hasil pengamatan awal di kabupaten kepulauan Talaud belum adanya produk hukum yang secara khusus mengatur tentang kelembaggan masyarakat dalam konteks pembangunan di tingkat kelurahan sehingga masih mangacu pada peraturan Menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Jika dilihat dari produk hukum di atas lembaga kemasyarakatan diberikan tempat untuk bersama-sama dalam menentukan kebijakan publik, dalam artian lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintah kelurahan maupun desa.

Kelurahan Beo Barat sebagai salah satu kelurahan yang ada di kecamatan beo Kabupaten Kepulauan Talaud yang secara khusus menjadi pusat perekonomian di kecamatan perlu adanya peran dari semua pihak dalam meningkatkan kerja sama terhadap perencanaan pembangunan yang ada, hasil observasi yang dilihat masi kurangnya fasilitas yang belum memadai untuk mendongkrak perekonomian, sehingga perlu adanya kerja keras dari semua pihak yang bersangkutan untuk menciptakan koordinasi yang baik sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat lewat perencanaan pembangunan.

Dalam proses perecnanaan pembangunan peran lembaga pemberdayaaan masyarakat sangatlah penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang di keluarkan pemerintah kelurahan beo barat. di kelurahan beo barat sendiri lembaga pemberdayaan masyarakat baru berdiri pada tahun 2018.

Dalam proses perjalanannya Peneliti melihat bahwa peran lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan Beo Barat dalam proses perencanaan sangatlah memperhatikan karena dari obserpasi yang di lakukan, Peneliti melihat peran lembaga pemberdayaan masyarakat khususnya pada tahun 2008-2019 sangat tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal ini tidak sejalan dengan tugas dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat yang di atur dalam permendagri no 5 tahun 2007.

Lembaga pemberdayaan masyarakat merupakan lembaga yang sudah di persiapkan Negara dalam rangka mengawal serta mewujudkan kesejahteraan di kelurahan maupun di desa, di kelurahan Beo Barat sendiri peran lembaga pemberdayaan masyarakat sangatlah memperhatikan karena tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang sebagaimana menjadi harapan masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan di kelurahan Beo Barat. Peran yang diharapkan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dapat diidentifikasi berdasarkan pengumpulan data awal dilapangan, pertama adalah harapan masyarakat terhadap lembaga tersebut, dimana masyarakat dapat memanfaatkan kapasitas lembaga untuk memberikan partisipasi tentang kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur maupun sosial pelestarian adat dan budaya, kedua wujud atau perilaku dari lembaga untuk melaksanakan fungsi sesuai dengan ekspektasi masyarakat, serta didukung oleh sumber daya atau pengurus lembaga yang mumpuni, ketiga adalah norma yang diterapkan oleh lembaga tersebut, dimana dapat

beradaptasi dengan tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat, keempat adalah penilaian dan pemberian sanksi yang jelas oleh Lurah sebagai pejabat yang menerbitkan Surat Keputusan pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat, selain penilaian secara moral yang dilakukan oleh masyarakat.

Oleh karena itu dilihat dari penjelasan di atas terdapat masalah pada lembaga pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di kelurahan beo barat sehingga perlu adanya kontribusi dari semua masyarakat. Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peranan LPM dalam proses perencanaan pembangunan Di Kelurahan Beo Barat kecamatan Beo kabupaten kepulauan Talaud?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. menurut Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh (Moleong 210:132). Menyatakan bahwa Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sejalan dengan definisi tersebut. sebagaimana yang di kutip (Maleong, 2010:132). Mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam

kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan muda bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka Peneliti menetapkan lokasi penelitian terletak di **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Beo Barat.**

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis Fokus serta untuk mengetahui sejauhmana peran atau peranan yang dilakukan oleh Peran Lembaga Pemberdayaaan Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di kelurahan Beo Barat. Dengan demikian peneliti akan menjelaskan Indikator perilaku dalam kaitannya dengan peran, berdasarkan konsep Biddle dan Thomas dalam Sarwono (2015:216-217) yang meliputi 1), *Expectation* (Harapan), 2), *Performance* (wujud perilaku), 3), *Norm* (Norma). 4), *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dianalisa semua data diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara seperti yang sudah sajikan pada bagian sebelumnya. Adapun analisa yang dilakukan adalah dengan analisa deskriptif kualitatif dengan tetap mengacu pada hasil interpretasi data dan informan data tersebut sesuai dengan fokus kegiatan penelitian.

Dari seluruh data dan informasi yang telah dikumpulkan, baik melalui studi pustaka, wawancara mendalam (*depth interview*) dengan informan studi dokumentasi maupun catatan-

catatan Peneliti sewaktu melakukan penelitian selama dilapangan, maka dapat diberikan suatu analisa tentang Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) Dalam Pembangunan Kelurahan Beo Barat kecamatan Beo.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator

Peran LPM sebagai fasilitator di Kelurahan adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai fasilitator LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat Kelurahan di Beo Barat. Peran LPM di Kelurahan Beo Barat memang terlihat sebagai fasilitator didalam upaya menyusun rencana-rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM didalam melakukan aktivitas rapat dan hearing antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan, DPRD Kota dan juga perusahaan disekitar kelurahan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kelurahan Beo Barat. Agar dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator yang baik ada beberapa aspek yang dikaji didalamnya sebagi berikut:

a. Masyarakat Ikut Merencanakan Pembangunan

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan kelurahan merupakan bentuk tanggung jawab untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di kelurahan mereka demi tercapainya pembangunan di

segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang ekonomi yang berbentuk bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan kelurahan mereka dan juga harus bertanggung jawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat kelurahan dan seterusnya.

Masyarakat yang aktif seperti Peneliti lampirkan dalam kutipan wawancara yang disajikan dalam penyajian data, di dalam pembangunan di daerahnya akan mempercepat kemajuan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Ikut merencanakan pembangunan bukan hanya di bidang fisik tetapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat juga dapat disampaikan melalui LPM Beo Barat. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan LPM. Berdasarkan hasil kutipan wawancara, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program, hanya terlihat pada proses perencanaan program penguatan kelembagaan ditingkat kelurahan. Itu juga tidak di semua kelurahan. Keterlibatan LPM lebih pada bentuk keikutsertaan saja dalam setiap pertemuan yang diadakan untuk membahas rencana kegiatan.

Sedangkan dalam bentuk penyampaian gagasan, dan pikiran lebih didominasi oleh Pemerintah Kelurahan. Sehingga belum menjamin semua aspirasi masyarakat dapat ditampung. Masyarakat yang aktif di dalam menggerakkan kemajuan pembangunan kelurahan memainkan peranan penting dalam pembangunan khususnya LPM Beo Barat, untuk memperkuat data maka ditanyakan secara langsung kepada Key Informan

(Fasilitator LPM Beo Barat) dengan diperoleh jawaban bahwa partisipasi masyarakat kurang dalam menjalankan program-program LPM karena kurang kesadaran dari masing-masing individu, zaman sekarang rasa kebersamaan dan gotong royong sudah sangat berkurang, hal itu dikarenakan masyarakat menganggap aparat atau lembaga sudah digaji oleh pemerintah dan mereka menganggap itu memang sudah menjadi tugas mereka.

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator melalui LPM Beo Barat belum maksimal ataupun masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang aktif dan tidak memiliki kesadaran merencanakan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat dari masyarakat itu sendiri.

b. Masyarakat Ikut Menentukan Prioritas Usulan Program

Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga mendesak dilaksanakan baik ditingkat kelurahan maupun Kelurahan. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan oleh kelurahan dan mendesak untuk dilaksanakan. Melalui usulan program yang disampaikan masyarakat kepada forum musyawarah akan ditindaklanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan Beo.

Masyarakat yang memiliki rasa peduli dengan kemajuan pembangunan dapat ditunjukkan

dengan keikutsertaannya di dalam memberikan usulan program LPM antara lain dengan ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat yaitu dengan hadir ketika rapat diadakan di Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat maka, Peneliti mencoba menyimpulkan bahwa Peran Lembaga Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator dengan masyarakat ikut menentukan prioritas usulan program adalah kurang maksimal atau masih rendah, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Jelas, jika hanya struktur-struktur kelurahan yang menyampaikan usulan program, akan ada yang membawa kepentingan masing-masing kelurahan. Jadi akan lebih baik jika LPM sebagai fasilitator juga melakukan observasi terjun langsung kepada masyarakat untuk melihat dan menentukan prioritas usulan program apa yang akan dilaksanakan. Adapun sebagian kecil masyarakat yang hadir, juga tidak menunjukkan respon yang aktif. Berdasarkan hasil wawancara oleh Ketua LPM bahwa penentuan usulan rapat prioritas masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi *no coment*. Dan masyarakat beranggapan LPM tidak bisa berbuat apa-apa.

2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator

LPM sebagai mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu

kepada semua elemen masyarakat. LPM Beo Barat mensosialisasikan hasil rancangan yang akan diusulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga dan juga melalui bentuk undangan rapat.

a. Masyarakat Ikut Dalam Rapat yang Diadakan

Kegiatan LPM tidak akan berjalan bila tidak adanya peran serta dari masyarakat, sebab masyarakat tidak mau menghadiri rapat jika tidak ada orang yang menggerakkan. Kebijakan pemerintah melalui LPM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di kelurahan mereka tinggal.

Masyarakat yang ikut dalam rapat merupakan orang yang berpartisipasi ataupun perwakilan untuk membawakan aspirasi tentang program-program pembangunan yang dibutuhkan. Masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan merupakan orang-orang yang dipercayakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan LPM yang telah disepakati di Kecamatan Beo.

Dari hasil wawancara bahwa ada masyarakat selalu menghadiri rapat agar dapat mengusulkan apa-apa saja yang menjadi kegiatan prioritas yang akan dilakukan di Kelurahan Beo Barat. Selanjutnya Peneliti juga meminta pernyataan dari informan dengan pertanyaan yang sama. Dari kutipan wawancara tersebut dapat kita lihat bahwa warga yang bersangkutan mengikuti yang diadakan LPM disebabkan karena mereka menyadari bahwa program yang akan diadakan pemerintah ini untuk kemajuan bagi daerahnya. Hal ini mengindikasikan rasa tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Masyarakat yang ikut dalam rapat dapat mengetahui adanya kegiatan

rapat yang akan dilaksanakan karena disebabkan oleh kesadaran mereka sendiri tentang pentingnya LPM untuk mengadakan rapat, guna pembangunan di Kelurahan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM untuk masyarakat. Dari kondisi ini, mengindikasikan peran LPM sebagai Mediator sudah berjalan karena selaku lembaga yang ditunjuk pemerintah telah mengadakan rapat di Kelurahan Beo Barat untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dan menyampaikan hambatan-hambatan yang ada di Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo.

b. Masyarakat Ikut Memberikan Informasi bagi Berjalannya Program Pembangunan

Masyarakat yang berpartisipasi dalam program pembangunan juga harus menerima informasi termasuk sosialisasi tentang kegiatan yang akan dibuat oleh LPM. Namun kegiatan pembangunan yang dibuat tidak akan berjalan jika masyarakat tidak ikut memberikan informasi tentang pembangunan yang akan dibuat maupun memberikan informasi yang di dapat kepada orang lain yang tidak hadir pada saat rapat LPM di Beo Barat Kecamatan Beo.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan sudah diselenggarakannya sosialisasi LPM dalam memberitahukan apa-apa saja yang menjadi tujuan informasi LPM. Anggapan mereka, kegiatan apa saja yang dilakukan pemerintah untuk memajukan kelurahan mereka pasti

diberi dukungan. Semua masyarakat ketika diadakan rapat harus memberikan partisipasinya, atau mendapatkan informasi dari orang lain tentang adanya kegiatan yang akan dilaksanakan oleh LPM melalui musyawarah. Partisipasi masyarakat dalam ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan merupakan kesukarelaan yang diberikan secara pribadi oleh setiap orang yang melihat dan mengetahui tentang apa yang berkaitan dengan LPM.

Kemudian diperkuat pula keterangan yang diberikan oleh key informan selaku fasilitator LPM yang mengatakan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang LPM sangat kurang, sumber daya masyarakat Kelurahan Beo Barat masih rendah dan kurang terorganisirnya masyarakat baik secara organisasi. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah memberikan informasi hanya sebatas yang mengikuti rapat dan memiliki tingkat sosial yang tinggi. Sedangkan bagi masyarakat yang kurang peduli dan tidak mau tahu dengan program, maka tidak mendapatkan informasi LPM. Hal ini mengindikasikan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator sudah berjalan tetapi belum menyeluruh ke masyarakat banyak, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat hanya orang-orang yang aktif di kelurahan saja dan pihak-pihak yang peduli dengan pembangunan yang dibuat oleh LPM termasuk juga kurangnya sosialisasi bagi masyarakat Kelurahan Beo Barat.

3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Motivator

Motivator dipandang sebagai ujung tombak dan pionir pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat. Motivator ini bisa para tokoh yang ada di masyarakat maupun segenap aparat pemerintahan yang ada di kelurahan, bahkan ditingkat kecamatan maupun kabupaten. Banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, memobilisasi, menjembatani, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator. Sehingga peran motivator sangat penting dan strategis.

a. Masyarakat Memampatkan Pembangunan yang Sudah Dibangun

Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Beo Barat tidak akan terwujud jika semua masyarakat belum memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dan di dukung juga dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai lembaga yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi.

Partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan yang dibuat adalah dengan ikut bekerja dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun bidang ekonomi. Kebijakan pemerintah melalui LPM adalah bertujuan memberdayakan semua masyarakat untuk memperoleh data berkaitan dengan permasalahan tersebut, diberikan wawancara secara langsung kepada semua informan. Jawaban yang diberikan informan sebagai berikut, partisipasi masyarakat yang masih tergolong rendah apabila masyarakat tidak mau ikut bekerja dan

bergabung di dalam membangun daerahnya serta mensukseskan pembangunan yang dibuat oleh LPM, seperti halnya yang bertolak belakang dikatakan oleh salah seorang ibu yang ikut berpartisipasi. Program LPM merupakan program yang ditujukan untuk masyarakat maka perlu partisipasi masyarakat untuk ikut bekerja dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat. Adapun pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan seperti perbaikan jalan, pembangunan sarana kesehatan, perbaikan pasar, penyediaan sarana MCK, pembuatan kebun dan lain-lain yang telah dinikmati oleh masyarakat Kelurahan Beo Barat. Hal ini sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh salah satu masyarakat Kelurahan Beo Barat yang mengatakan salah satunya MCK yang dibangun pas dilokasi yang sangat dibutuhkan masyarakat karena masih ada yang daerah pedalaman. Hal ini dapat memberi gambaran bahwa warga setempat dapat memanfaatkan bangunan yang telah dibuat. Berdasarkan observasi yang dilakukan dan dari hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key Informan dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah sepenuhnya dalam memanfaatkan pembangunan yang dibuat oleh LPM Beo Barat.

b. Masyarakat Ikut Merawat Pembangunan yang Sudah Dibuat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masing-masing kelurahan yang telah dibuat ditunjukkan dengan mereka ikut merawat semua pembangunan yang telah diberikan pemerintah sebagai perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Masyarakat perlu memberikan partisipasi demi tercapainya program

LPM yang telah berjalan di Kelurahan Beo Barat. Perawatan pembangunan ditujukan bagi semua masyarakat yang ikut menikmati hasil pembangunan. Jika hasil pembangunan yang telah dibuat tersebut tidak dirawat oleh masyarakat maka bantuan dana dapat dihentikan dan masyarakat tidak memperoleh fasilitas dari bantuan pemerintah LPM. Partisipasi masyarakat di dalam perawatan pembangunan yang telah dibuat merupakan rasa peduli karena masyarakatlah yang menikmati hasil pembangunan berikut. Dari hasil wawancara, Peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat belum menyadari untuk merawat bangunan yang telah di bangun. Tingkat partisipasi untuk merawat bangunan yang telah dibuat masih rendah.

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key informan maka dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat Kelurahan Beo Barat dalam perawatan hasil Pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatian masyarakat merawat keadaan fisik yang telah dibuat.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan dimasyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan

dimasing-masing wilayah dia berdomisili. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tertentu merupakan tugas.

Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi–kreasi, mengontrol lingkungan sumber dayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di tanah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi proses pembangunan dan pemerintahan (Sutoro Eko 2002).

Dengan kata lain ia lebih berada pada dimensi proses dari kebijakan penerapan ke kebijakan hasil/dampak. Artinya, kegiatan ini akan menghasilkan sejumlah pemahaman dan penjelasan berkenaan dengan proses penerapan program yang di pantau. Kegiatan ini lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan informasi. Pengawasan diperlukan untuk menyesuaikan perencanaan dan bentuk pembangunan dengan memeperkecil dampak negatif yang mungkin ditimbulkan. Peran masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPM yang ditunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadya dalam program yang telah dibuat oleh pemerintah demi kemajuan pembangunan diwilayah Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo.

Keberhasilan suatu pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya semua program-program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik itu dalam pelaksanaan kerja, maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran

maupun materi yang bertujuan untuk mensukseskan pembangunan yang telah diupayakan agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu LPM sendiri semestinya melakukan pemantauan, pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, sudah sampai dimanakah program pemerintah yang telah di fasilitator oleh LPM tersebut.

Program LPM ini merupakan program yang ditujukan untuk kelurahan maka perlu partisipasi masyarakat kelurahan untuk ikut bekerja didalam pelaksanaan pembangunan yang akan dibuat. Adapun pembangunan-pembangunan yang sudah dilaksanakan seperti pembangunan perbaikan jalan, pembuatan kebun masyarakat, kegiatan dalam bentuk pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan dari observasi dan hasil wawancara dengan masyarakat maupun Key informan dapat disimpulkan bahwa Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan fasilitator kelurahan yang mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik atau tidaknya sebab masyarakat langsung memanfaatkan hasil program tersebut.

Kegiatan LPM merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan dari pihak LPM itu sendiri

secara bersama-sama oleh masyarakat Beo Barat. Peran masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap mau ikut memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dimasih-masing kelurahan.

5. Kendala yang Dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beo Barat

Secara umum permasalahan yang dihadapi pemberdayaan masyarakat kelurahan (LPM) Beo Barat disebabkan oleh dua faktor utama yang saling mengkait satu sama lain, yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala yang berasal dari dalam individu atau mastarakat yang ada di Kelurahan Beo Barat. Sementara faktor eksternalnya adalah belum kondusipnya aspek kelembagaan yang ada. Disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat ditumbuh-kembangkan.

Hambatan utama yang dihadapi oleh LPM ini adalah kemampuan yang menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat. Keterlibatan LPM dalam menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dapat dilihat dan keterlibatan dalam menggerakkan massa dan kesediaan dalam mengumpulkan dana. Selain itu kemampuan LPM dalam melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pembangunan. Berbagai program pengembangan masyarakat yang dilaksanakan di Kelurahan Beo Barat, tidak pernah diadakan evaluasi sehingga tidak diketahui bagaimana manfaat program terhadap kelompok sasaran, faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat pelaksanaan kegiatan

serta ketepatan pelaksanaan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. LPM juga kurang mampu memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif, baik tenaga, materi, maupun pemikiran. Hal ini menyebabkan kurangnya capaian sasaran pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan program yang ingin dibuat masing-masing. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator sudah berjalan dengan semestinya hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat sangat tinggi, sebab masyarakat menyadari pentingnya program yang dibuat LPM untuk masyarakat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Motivator sudah baik, tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Beo Barat dalam perawatan hasil pembangunan masih rendah sebab masih kurangnya perhatiannya masyarakat merawat keadaan fisik, bangunan yang telah dibuat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat digambarkan dengan hasil wawancara oleh masyarakat dan Fasilitator Kelurahan yang mengatakan sendiri bahwa jika program pemerintah tersebut sudah selesai maka masyarakatlah yang berhak menanggapi bagaimana baik dan tidaknya sebab masyarakat langsung yang memanfaatkan hasil dari program pemerintah tersebut. Dengan kata lain,

tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh pengurus LPM.

Diharapkan kepada Pemerintah Kelurahan untuk memberikan perhatian dengan mensosialisasikan program kepada masyarakat, menggerakkan, mengajak, menghimbau atau mengundang masyarakat untuk berpartisipasi sehingga LPM tidak berjalan dengan sendirinya serta perlu adanya pemahaman yang baik tentang alur dan tahapan LPM. Diharapkan kepada fasilitator LPM agar lebih memotivasi masyarakat agar kemandirian masyarakat dapat terwujud. Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung di dalam LPM Beo Barat baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk ikut serta dalam pembangunan di Kelurahan Beo Barat Kecamatan Beo.

DAFTAR PUSTAKA

- Hikmat Harry, 2010 *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: HUP.
- Kaelan, (2012), "Pendidikan kewarganegaraan", paradikma Yogyakarta perum. Nogotirto III, Jl. Bromo C97, Thrihanggo sleman.
- Moleong J. Lexy, (2010), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung :PT.
- Riyadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W, 2015, *Teori-Teori Psikologi social*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

- Siahaan, (2013), *Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia
- Subandi. 2011. "Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)". Bandung: Alfabeta
- Sondang P. Siagan, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Sinar Terang.
- Sumber-Sumber Lainnya
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Umdang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2018 Tentang pembentukan kecamatan

s